

**KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SUB SEKTOR
PETERNAKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN MAMUJU**

Skripsi



**OLEH
NURDIN**

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR | |
| No. Skripsi | 01-00-2001 |
| Judul | fak. peternakan |
| Program | 1 exp |
| Majalah | Hadrah |
| No. Inventaris | 010001 98 |
| No. Klas | 15113 |



**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001**

**KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SUB SEKTOR
PETERNAKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN MAMUJU**

**OLEH
NURDIN**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada
Fakultas Peternakan
Universitas Hasanuddin**



**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001**

RINGKASAN

Nurdin. Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, di bawah bimbingan Ir. Abd Hamid Hoddi, MS sebagai pembimbing Utama dan Ir. Martha B. Rombe, MP sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, mulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2001. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui persentase (%) sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mamuju.

Data diperoleh dari Kantor Dinas Peternakan berupa data populasi ternak dan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor peternakan, Kantor Dinas Pendapatan Daerah berupa laporan realisasi dan target penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kantor Dinas Statistik berupa data keadaan wilayah secara umum dan penduduk. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan maka di gunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

(Asri, 1991)

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sub sektor peternakan Kabupaten Mamuju selama lima tahun cukup besar, jika dibandingkan rata-rata pendapatan dari sub sektor lain.


Judul : KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SUB
SEKTOR PETERNAKAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN MAMUJU

Nama : Nurdin

No. Pokok : 1311 95 017

Jurusan : Sosial Ekonomi Peternakan

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh


Ir. Abd. Hamid Hoddi, MS
Pembimbing Utama


Ir. Martha B. Rombe, MP
Pembimbing Anggota

Diketahui Oleh :



Prof. DR. Ir. M.S. Effendy Abustam, MSc
Dekan


Ir. Muh. Djufri Palli
Ketua Jurusan

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-

Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Abd. Hamid Hoddi, MS sebagai pembimbing utama dan Ibu Ir. Martha B. Rombe, MP sebagai pembimbing anggota yang telah membimbing sehingga skripsi ini dapat dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dekan Fakultas Peternakan Prof.DR.Ir.M.S. Effendy Abustam, MSc, Bapak Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Ir. Muh. Djufri Palli ,Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Hasanuddin Khususnya dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Peternakan pada umumnya.
3. Pemerintah Kabupaten Mamuju, terkhusus kepada Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah, beserta staf, Kepala Kantor Dinas Peternakan Beserta Staf, terkhusus kepada Bapak Ir.H.Abdullah Rasyid dan Kepala Kantor Dinas Statistik di Kabupaten Mamuju.
4. Para Sahabat, rekan dan teman-teman Mahasiswa Fakultas Peternakan terutama angkatan 95 (Alternatif) dan terkhusus " Anggota Kodm 95" Wali, Iful, Memed, Didin, Buca, Iffan dan Irvan, ikbal serta para sahabat dan teman-teman lain yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Para Sahabat dan teman-teman di Kompleks Bukit Hartaco Indah terutama untuk Remaja Mandiri, Ir. Sufriadi, Syarif, Agus, Afri, Madi, Dhia, lina dan teristimewa Nunu. Serta keluarga Syarifuddin (Bapak Nurul) Blok IF/9.

6. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta Makkajang Sinjata dan Saridang yang senantiasa mendoakan penulis selama menuntut ilmu, kakak-kakaku Mansyur dan Maryati sekeluarga di Mamuju, kamaluddin sekeluarga di Kodam, ifa, fuddin sekeluarga, Eni, Hajrah yang selama ini banyak membantu penulis, Seluruh keluarga dan kepenakanku yang tidak sempat kami sebut satu persatu, yang telah memberi perhatian dan bantuan selama study sampai penulis selesai di perguruan tinggi.

Tak ada gading tak retak, maka demikian pula skripsi ini, oleh karena itu penulis membuka tangan dari setiap kritikan yang sifatnya membangun dari para pembaca demi baiknya skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu demi terselesainya skripsi ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang di ridhai Allah SWT, Amin.

N u r d i n

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| PENDAHULUAN | |
| Latar Belakang | 1 |
| Perumusan Masalah | 2 |
| Hifotesa | 3 |
| Tujuan Peenelitian | 3 |
| Kegunaan Penelitian | 3 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| METODE PENELITIAN | |
| Waktu dan Tempat Penelitian | 11 |
| Pengumpulan Dasar | 11 |
| Analisa Data | 11 |
| Konsep Operasional | 12 |
| KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN | |
| Letak Geografis | 13 |
| Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk | 15 |
| Tingkat Pendidikan | 18 |

| | |
|--|----|
| Sarana dan Prasarana Kesehatan | 19 |
| Agama | 20 |
| Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sub Sektor Peternakan Yang Dikelola Di Kabupaten Mamuju | 21 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Dari Sub Sektor Peternakan | 23 |
| Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju | 25 |
| Potensi Sumber Daya Alam | 29 |
| Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju | 30 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | |
| Kesimpulan | 31 |
| Saran | 31 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| No. | Teks | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1. | Luas Daerah Tiap Kecamatan Di Kabupaten Mamuju, 2000..... | 14 |
| 2. | Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2000 | 15 |
| 3. | Jenis Lapangan Kerja Utama Penduduk Kabupaten Mamuju Menurut Jenis Kelamin, 2000 | 17 |
| 4. | Tingkat Pendidikan Penduduk Di Kabupaten Mamuju, 2000 | 18 |
| 5. | Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Gudang Farmasi Di Kabupaten Mamuju, 2000..... | 19 |
| 6. | Komposisi Pemeluk Agama Di Kabupaten Mamuju, 2000 | 20 |
| 7. | Tarif Pajak Potong Hewan Di Kabupaten Mamuju, 2000 | 21 |
| 8. | Pendapatan Asli daerah (PAD) Dari Sub Sektor Peternakan Di Kabupaten Mamuju, 2000 | 23 |
| 9. | Target dan Realisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Di Kabupaten Mamuju, 2000 | 28 |
| 10. | Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Mamuju | 30 |

DAFTAR GAMBAR

| No. | <u>Teks</u> | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sub Sektor Peternakan Kabupaten Mamuju | 24 |
| 2. | Populasi Ternak Di Kabupaten Mamuju | 26 |
| 3. | Banyaknya Pemotongan Ternak Di Kabupaten Mamuju | 27 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. | <u>Teks</u> | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1. | Populasi Ternak Di Kabupaten Mamuju (1996-2000) | 34 |
| 2. | Pemotongan Ternak Di Kabupaten Mamuju, 2000 | 34 |
| 3. | Banyaknya Pengeluaran Ternak Dan Hasil Ternak Yang Diantar Pulaukan Di Kabupaten Mamuju (1996-2000) | 35 |
| 4. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sub Sektor Peternakan Kabupaten Mamuju (1996-2000) | 36 |
| 5. | Perhitungan Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Lain Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju | 37 |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah secara nasional untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata bagi seluruh rakyat indonesia. Hal tersebut dapat dicapai melalui perekonomian yang baik dan terencana serta didukung dengan moral yang tinggi.

Bertolak dari asumsi diatas bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan atau tergantung pada tersedianya biaya yang besar untuk itu pemerintah harus mengelola sumber-sumber keuangan daerah baik daerah tingkat satu (propinsi) maupun daerah tingkat dua (kabupaten/kotamadya) pada khususnya.

Oleh karena itu pengembangan sub sektor peternakan dalam pembangunan di kabupaten Mamuju menjadi sangat penting :

- Produk peternakan adalah merupakan sumber produksi hewani yang sangat dibutuhkan manusia dalam pertumbuhan dan peningkatan kecerdasan, selain itu merupakan sumber pendapatan penduduk.
- Tersedianya areal yang sangat luas untuk peternakan .
- Dari segi pemasaran, letak kabupaten Mamuju adalah strategi, karena dengan lancarnya perhubungan memungkinkan dapat terjangkau kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan dan bahkan menghubungkan beberapa propinsi, diantaranya Kalimantan dan Sulawesi Tengah.

- Sub Sektor Peternakan khususnya, yang harus dikembangkan karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pembangunan di daerah Kabupaten Mamuju, pemerintah daerah telah berusaha menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) setempat dari seluruh potensi yang ada seperti retribusi dari sub sektor peternakan, retribusi dari sektor pertanian, retribusi sektor kehutanan dan perkebunan, retribusi sektor perikanan, retribusi perdagangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan kondisi yang ada, maka potensi dari sub sektor peternakan khususnya pajak dan retribusi sub sektor peternakan yang sengaja diteliti untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk pendapatan asli daerah dalam menghadapi otonomi daerah Kabupaten Mamuju.

Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan sebagai salah satu kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mamuju.

Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka diajukan hipotesa yaitu :

- I. Diduga bahwa kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan sangat besar sebagai pendapatan asli daerah (PAD), dibandingkan dengan rata-rata pendapatan dari sub sektor lain.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase (%) sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mamuju.

Kegunaan Penelitian

Sebagai bahan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dalam bidang peternakan di daerah Kabupaten Mamuju.

TINJAUAN PUSTAKA

Peternakan Secara Umum

Istilah 'peternakan' dan 'ternak' mengandung makna tertentu yang bersifat timbal balik antara dua sistem, kegiatan yang mengelolah ternak itulah yang disebut peternakan. Dalam kegiatan ini tersirat makna bisnis yang berorientasi pada pencapaian keuntungan. Tentunya pengelolaan ini harus menurut aturan teknis dan hakikat dari bisnis. Dengan dasar inilah maka ternak harus memberikan keuntungan kepada peternak karena telah dirawat dengan baik. Bentuk keuntungan itu berupa hasil produksi yang sangat diharapkan oleh peternak (Rasyaf, 1996).

Peternakan yang berorientasi pada bisnis akan menekankan sumber daya se efisien mungkin, ini bukan berarti penggunaan sumber daya sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya. Prinsip ini tidak berlaku untuk bisnis dan teknis peternakan, semua sumber daya digunakan pada porsi yang sebenarnya. Disinilah letak perbedaan antara usaha peternakan dengan beternak sekedar memelihara. Sebab semua biaya yang dikeluarkan harus kembali, bahkan harus menghasilkan lebih banyak dibanding biaya yang sudah dikeluarkan (Rasyaf, 1997).

Aziz (1993), menyatakan bahwa strategi menuju industri peternakan terdiri dari pendekatan teknis, pendekatan terpadu dan pendekatan agribisnis. Pada ketiga pendekatan ini kerja sama antara para peternak dan perusahaan diutamakan dimana perusahaan yang menyediakan sarana produksi, dan peternak yang melaksanakan penggemukan, yang selanjutnya akan dikelolah dan kemudian dipasarkan.

Dengan adanya tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia usaha peternakan mempunyai prospek yang cerah, lebih-lebih karena :

- a. Pemasaran yang semakin membaik, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.
- b. Sebagian besar penduduk Indonesia ($\pm 70\%$) bermata pencaharian dibidang pertanian yang tidak terlepas dari usaha sampingan dalam hal ini usaha peternakan.
- c. Indonesia sangat potensial untuk usaha peternakan karena :
 - Banyaknya padang rumput, yang dapat dijadikan lahan untuk persediaan makanan alami dari ternak.
 - Banyaknya daerah yang mempunyai iklim sangat cocok untuk peternakan.
 - Semakin meningkatnya hasil ikutan dari usaha pertanian seperti bungkil kelapa, kacang tanah, bungkil kedelai, bekatul, dan lain sebagainya cocok untuk makanan ternak (Anonim, 1993).

Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa atas dasar tingkat jumlah produksi, macam teknologi yang dipakai banyaknya hasil produksi yang dipasarkan maka macam usaha peternakan di Indonesia dapat digolongkan kedalam tiga bentuk yaitu :

1. Usaha yang bersifat tradisional.
2. Usaha yang bersifat backyard
3. Usaha komersil.

Kenyataan yang kompleks dihadapi dalam pembangunan peternakan adalah sebagian besar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan didalam memelihara ternaknya hanya dilakukan sebagai usaha sampingan selain usaha pokoknya yaitu

bertani, dengan demikian pola pemeliharaannya masih sangat sederhana (Kustiah, 1988).



Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber asli pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal; dari pemerintah yang berupa subsidi/ bantuan, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 1997).

Pemerintah daerah tingkat I dan II mengutip bayaran untuk layanan yang disediakan bagi datu II, pungutan merupakan sumber pendapatan yang sangat penting hampir menjadi setengah dari seluruh pendapatan daerah. Sebagian besar pendapatan ini

digolongkan kedalam pungutan (Retribusi) tetapi jumlah yang cukup besar juga dicatat dibawah penerimaan dari dinas (Devas, 1989).

Sumber pembiayaan yang utama dan bersifat langgeng dalam mendukung pembangunan daerah adalah swadaya masyarakat atau tabungan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) (Anonim, 1997).

Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka dengan sendirinya kepadanya diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan yang diberikan pada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Soemarso, 1994).

Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Mardiasmo, 1997).

Menurut Kamaruddi (1988), bahwa anggaran belanja yaitu suatu alat yang dapat menjadi sumber kemajuan ekonomi dan tergantung cara penggunaan dan kebijaksanaan pemerintah setempat.

Dinas pendapatan daerah ditiap-tiap daerah bertanggung jawab atas semua penerimaan daerah, walaupun masih banyak dari penerimaan ini sesungguhnya dipungut oleh kantor atau lembaga lain (Devas, 1989).

Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok dari daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya

Ibnu Syamsi (1983) sebagai berikut, pajak ialah iuran berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pendapat diatas dapatlah terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalah :

- a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan hukum atau kekuatan undang-undang lainnya.
- b. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran negara dan sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi.
- d. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara (Budetair) juga berfungsi sebagai pengatur (Regulair).

Soemitro (1990), bahwa pajak lokal atau daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah, seperti propinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan sebagaian (tanpa tahun penerbit) menyatakan bahwa pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Dari pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Waluyo, 1997).

Anonim (1991), menyatakan bahwa untuk mendapatkan surat keterangan pengeluaran keluar daerah maka setiap ternak harus dilengkapi :

1. kartu milik ternak (perubahan pemilikan ternak dan cap ternak).
2. surat perjanjian surat beli
3. tanda bukti pembayaran biaya pemeriksaan dan penitipan.

Untuk menjamin ketertiban pemilikan ternak dalam kabupaten mamuju, maka dipandang perlu pemberian cap/ tanda pengenal pada setiap ternak, dilakukan secara bersama-sama dengan pemberian kartu ternak dan perubahan pemilikan ternak.

Waluyo (1997), menyatakan bahwa Objek retribusi terdiri dari : (a) jasa umum (b) jasa usaha (c) perizinan tertentu. Sedangkan menurut penggolongannya (a) retribusi jasa umum, (b) retribusi jasa usaha dan (c) retribusi perizinan tertentu.

Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Adapun retribusi daerah adalah suatu pembayaran yang dilakukan di daerah karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah yang berkepentingan (Soemarso, 1994).

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk layanan dan barang yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal perorangan bebas

menentukan besar layanan tertentu yang hendaknya dinikmati, harga layanan itu memainkan peranan yang penting dalam menjaga permintaan, mengurangi penghamburan dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besarnya produksi layanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan sumberdaya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan dapat selaras. Tetapi memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat pribadi dengan kata lain untuk dapat dinikmati hanya jika orang membayar (Devas, 1989).

METODE PENELITIAN

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah kabupaten Mamuju, yang berlangsung dua bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2001.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan selama penelitian ini berlangsung, meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai/petugas dipenda dan pegawai dinas peternakan setempat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh pada kantor dipenda, dinas peternakan dan kantor statistik Kabupaten Mamuju.

Analisa Data

Untuk mengetahui jumlah kontribusi pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pajak dan retribusi sub sektor peternakan maka digunakan rumus seperti yang didasarkan oleh Asri (1991) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak \& Retribusi Sub Sektor Peternakan} = \frac{\text{Penerimaan Pajak \& Retribusi Sub Sektor Peternakan}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah Kab. Mamuju}} \times 100\%$$

Konsep Operasional

- Kontribusi adalah besarnya nilai sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total pendapatan asli daerah yang dinyatakan dalam persentase(%).
- Kontribusi besar jika berada diatas nilai rata-rata kontribusi dari sub sektor lain.
- Kontribusi sedang jika sama dengan nilai rata-rata kontribusi sub sektor lain.
- Kontribusi kecil jika berada dibawah nilai rata-rata kontribusi sub sektor lain.
- Pajak adalah iuran berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah setempat berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- Retribusi yaitu pembayaran kepada negara yang dilakukan mereka yang menggunakan jasa negara.
- Pendapatan asli daerah adalah keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Letak Geografis

Kabupaten Mamuju terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Selatan atau pada bagian barat dari pulau Sulawesi. Letaknya kurang lebih 500 Km dari Kotamadya Makassar. Kabupaten Mamuju dengan luas wilayahnya 1.105.781 Ha.

Kabupaten Mamuju berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut :

- ✧ Sebelah Utara : Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah.
- ✧ Sebelah Timur : Kabupaten Luwu.
- ✧ Sebelah Selatan : Kabupaten Majene, Kabupaten Polmas, Kabupaten Tanah Toraja.
- ✧ Sebelah Barat : Selat Makassar.

Secara Administrasi Kabupaten Mamuju terbagi atas 12 kecamatan (enam kecamatan defenitif dan enam kecamatan perwakilan) dan terdiri dari 112 Desa, 8 Kelurahan, serta 12 unit pemukiman Transmigrasi (UPT). Berdasarkan hasil registrasi penduduk keadaan akhir tahun 2000, penduduk Kabupaten Mamuju berjumlah 292.087 jiwa , yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 151.235 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 140.852 jiwa. Adapun Luas tiap kecamatan di Kabupaten Mamuju dapat kita lihat pada tabel 1.

Tabel 1. Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2000.

| No. | Kecamatan | Luas - Area (Ha) | Persentase (%) |
|-----|--------------------|------------------|----------------|
| 1. | Tapalang | 63.125 | 5,71 |
| 2. | Mamuju | 26.093 | 2,36 |
| 3. | Kalukku | 58.236 | 5,27 |
| 4. | Perw. Papalang | 16.043 | 1,45 |
| 5. | Perw. Sampaga. | 9.594 | 0,86 |
| 6. | Perw. Pangale. | 23.252 | 2,10 |
| 7. | Kalumpang | 319.688 | 28,91 |
| 8. | Budong-Budong | 124.056 | 11,22 |
| 9. | Perw. Topoyo. | 46.910 | 4,24 |
| 10. | Perw. Karossa. | 114.409 | 10,35 |
| 11. | Pasangkayu. | 260.494 | 23,56 |
| 12. | Perw. Bambalamutu. | 43.881 | 3,97 |
| | Jumlah | 1.105.781 | 100 |

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Mamuju, 2000.

Dari tabel 1 terlihat bahwa Kecamatan Kalumpang memiliki luas daerah yang paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya dimana luasnya sekitar 319.688 Ha atau 28,91 %. Sedangkan kecamatan yang lain memiliki luas yang paling kecil adalah Kecamatan Perwakilan Sampaga sebesar 9.594 Ha atau sekitar 0,8 %. Dari luas keseluruhan Kabupaten Mamuju

Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2000.

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Rata-Rata Kepadatan Penduduk (Per/Km ²) | Persentase (%) |
|-----|--------------------|------------------------|---|----------------|
| 1. | Tapalang | 19.101 | 30 | 6,54 |
| 2. | Mamuju | 38.870 | 149 | 13,31 |
| 3. | Kalukku | 39.724 | 168 | 13,6 |
| 4. | Perw. Papalang | 15.224 | 95 | 5,21 |
| 5. | Perw. Sampaga. | 13.347 | 139 | 4,57 |
| 6. | Perw. Pangale. | 12.367 | 54 | 4,23 |
| 7. | Kalumpang | 20.587 | 6 | 7,0 |
| 8. | Budong-Budong | 28.042 | 23 | 9,6 |
| 9. | Perw. Topoyo. | 11.592 | 25 | 3,97 |
| 10. | Perw. Karossa. | 20.761 | 18 | 7,1 |
| 11. | Pasangkayu. | 52.251 | 20 | 17,87 |
| 12. | Perw. Bambalamutu. | 19.987 | 46 | 6,84 |
| | Jumlah | 292.087 | 26 | 100 |

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten mamuju, 2000.

Kabupaten Mamuju yang memiliki jumlah penduduk sebesar 292.087 jiwa pada akhir tahun 1999, yang terdiri dari 151.235 jiwa laki-laki dan 140.852 jiwa perempuan.

Dengan rata-rata kepadatan penduduk 26 per km². Untuk melihat jumlah penduduk dan kepadatan penduduk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel 2.

Dalam tabel 2 dapat dilihat bahwa kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk yang terbesar adalah Kecamatan Pasangkayu yaitu sebesar 52.215 jiwa atau sekitar 17,87% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Mamuju. Dengan kepadatan penduduk rata-rata 20 per km², sedangkan Kecamatan Perwakilan Topoyo memiliki penduduk terkecil yaitu 11.592 jiwa atau sekitar 3,97%. Dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Mamuju dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 25 jiwa per km².

Banyaknya penduduk di Kecamatan Pasangkayu dikarenakan pada kecamatan ini terdapat pusat transmigrasi, yang merupakan tempat pengiriman penduduk dari berbagai suku yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan Kecamatan Perwakilan Topoyo yang memiliki penduduk yang sangat sedikit diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju dikarenakan kecamatan tersebut bagian pemekaran dari Kecamatan Budong-bodong.

Dilihat dari perekonomian penduduknya, Kabupaten Mamuju masih bersifat agraris, yang bertumpu pada sektor pertanian sehingga untuk melihat jenis lapangan kerja utama penduduk daerah Kabupaten Mamuju menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jenis Lapangan Kerja Utama Penduduk Kabupaten Mamuju Menurut Jenis Kelamin, 2000.

| No. | Jenis Lapangan Kerja | Jenis Kelamin | | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|-------|----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | | |
| 1. | Pertanian | 93.663 | 10.894 | 104.557 | 89,12 |
| 2. | Penggalian | 75 | 17 | 92 | 0,08 |
| 3. | Industri | 1.895 | 358 | 2.253 | 1,92 |
| 4. | Listrik | 120 | 44 | 164 | 0,14 |
| 5. | Konstruksi | 540 | 196 | 736 | 0,63 |
| 6. | Perdagangan | 952 | 1961 | 2.913 | 2,5 |
| 7. | Angkutan | 525 | 13 | 538 | 0,5 |
| 8. | Keuangan | 48 | 19 | 67 | 0,06 |
| 9. | Jasa-Jasa | 4.236 | 1767 | 6.003 | 5,12 |
| Total | | 102.054 | 15.269 | 117.323 | 100 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Mamuju, 2000

Dari tabel 3 terlihat pada umumnya penduduk Kabupaten Mamuju bekerja pada bidang pertanian termasuk didalamnya Sub Sektor Peternakan, yakni sebesar 104.557 jiwa (89,12%). Dengan jumlah pekerja laki-laki 93.663 jiwa, yang pada umumnya bekerja pada bidang pertanian sedangkan jumlah pekerja perempuan dari semua bidang usaha yang ada yaitu 15.269 jiwa. Dari jenis lapangan kerja diatas pertanian yang sangat besar disebabkan oleh karena daerah tersebut merupakan pusat transmigrasi, dan daerah yang sangat luas dibidang pertanian.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan suatu daerah akan sangat mempengaruhi pola pikir penduduk daerah tersebut. Pendidikan dapat diperoleh dari dua sumber yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diperoleh dari bangku sekolah, sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang diperoleh tanpa melalui bangku sekolah. Di daerah Kabupaten Mamuju masalah tingkat pendidikan sebagian besar dari pendidikan formal.

Untuk lebih jelasnya penyebaran penduduk menurut tingkat pendidikan dapat kita lihat pada tabel 4

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Mamuju, 2000.

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|-------|--------------------|---------------|----------------|
| 1. | Tidak Tamat SD | 3.390 | 5,34 |
| 2. | SD | 47.725 | 75,13 |
| 3. | SLTP/Sederajat | 8.532 | 13,43 |
| 4. | SLTA/Sederajat | 2.646 | 4,16 |
| 5. | Perguruan Tinggi | 1.230 | 1,94 |
| Total | | 63.523 | 100 |

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Mamuju, 2000

Dari tabel 4 terlihat bahwa program wajib belajar sudah terlaksana dengan baik terlihat banyaknya jumlah penduduk yang tamat SD yaitu 47.725 jiwa (75,13%), meskipun penduduk yang tidak tamat SD mempunyai jumlah yang cukup besar yakni 3.390 jiwa (5,34%), sedangkan jumlah penduduk yang melanjutkan Keperguruan Tinggi

sangat kecil yaitu 1.230 jiwa (1,94%) ini disebabkan karena masih kurangnya minat untuk melanjutkan keperguruan tinggi dan kurangnya penyuluhan masalah pendidikan di Kabupaten Mamuju.

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan sarana dan prasarana pendukung, seperti tersedianya Rumah Sakit, Paramedis, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik serta Gudang Farmasi.

Sarana pendukung dibidang kesehatan yang telah di sediakan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Gudang Farmasi di Kabupaten Mamuju, 2000

| No. | Sarana | Jumlah (Buah) | Persentase (%) |
|-------|--------------------|---------------|----------------|
| 1. | Rumah Sakit | 1 | 0,79 |
| 2. | Puskesmas | 17 | 13,49 |
| 3. | Puskesmas Pembantu | 105 | 83,33 |
| 4. | Poliklinik | 2 | 1,59 |
| 5. | Gudang Farmasi | 1 | 0,79 |
| Total | | 126 | 100 |

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Mamuju, 2000.

Dalam tabel 5 terlihat bahwa sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Mamuju sudah memadai, ini terlihat pada Puskesmas Pembantu sudah cukup besar

jumlahnya yaitu 105 buah (83,33%). Namun seiring dengan perkembangan jumlah penduduk maka sebaiknya sarana dan prasarana tersebut masih perlu untuk ditambah.

Agama

Bidang agama adalah salah satu unsur penting dalam meningkatkan mutu ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan beragama di Kabupaten Mamuju terjalin dengan rukun, dengan tetap menjalankan sikap toleransi antar sesama pemeluk agama yang berbeda, hal ini dapat di lihat pada tabel 6.

Tabel 6. Komposisi Pemeluk Agama di Kabupaten Mamuju Tahun 2000.

| No. | Agama | Jumlah (jiwa) | Persentase (%) |
|-------|---------|---------------|----------------|
| 1. | Islam | 247.872 | 84,9 |
| 2. | Kristen | 28.490 | 9,75 |
| 3. | Katolik | 2.719 | 0,93 |
| 4. | Hindu | 12.435 | 4,26 |
| 5. | Budha | 571 | 0,19 |
| Total | | 292.087 | 100 |

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Mamuju, 2000.

Dari tabel 6 terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Mamuju memeluk agama islam yaitu sebanyak 247.872 jiwa atau sebesar 84,9% dan agama kristen menduduki peringkat kedua yaitu sebesar 28.490 jiwa atau sebesar 9,75%. Sedangkan yang memeluk agama budha sangat sedikit yaitu sebesar 571 jiwa atau sebesar 0,19%.

Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sub Sektor Peternakan yang Dikelola Di Kabupaten Mamuju.

Kabupaten merupakan salah satu bagian dari Sulawesi Selatan yang terletak dibagian utara yang saat sekarang ini sedang giat-giatnya untuk membangun daerahnya, namun dengan pembangunan tersebut mereka membutuhkan dana yang sangat besar. Sedangkan dana pembangunan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan didalamnya sudah tercakup pendapatan asli daerah (PAD) dari sub sektor peternakan. Adapun jenis-jenis pendapatan asli daerah (PAD) dari sub sektor peternakan yang dipungut di Kabupaten Mamuju, Antara lain:

1. Pajak Potong Hewan

Pajak potong hewan diatur dalam perda nomor 15 tahun 1992. Dengan besarnya pajak potong hewan tersebut dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Tarif Pajak Potong Hewan Di kabupaten Mamuju, 2000

| No. | Jenis Ternak (Ekor) | Jenis Pajak Potong Hewan | | |
|-----|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Potong Usaha (Rp) | Potong Hajat (Rp) | Potong Darurat (RP) |
| 1. | Sapi/Kerbau | 10.000 | 5000 | 2.500 |
| 2. | Babi | 10.000 | 7.500 | 5.00 |
| 3. | Kambing | 1.000 | 1.000 | 5.00 |

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, 2000.

Adapun pelanggaran dari peraturan diatas maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Retribusi Kartu Ternak dan Perubahan Pemilikan Ternak.

Hal tersebut diatur dalam perda nomor 10 tahun 1991. dengan besarnya retribusi kartu ternak dan perubahan pemilikan ternak adalah sebagai berikut ;

- a. Sapi per ekor Rp. 1.500,- ; b. Kerbau Rp. 1.500,-

Apabila ada pelanggaran atas perda diatas maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

3. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)

Peraturan mengenai retribusi rumah potong hewan (RPH) diatur dalam perda nomor 16 tahun 1993 dengan besarnya retribusi yaitu ; a. Sapi per ekor Rp. 10.000,-;

- b. Kerbau Perekor Rp. 10.000,-; c. Kambing Rp. 2.500,-.

Apabila ada pelanggaran atas perda diatas maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

4. Retribusi Biaya Pemeriksaan dan Biaya Penyuntikan Hewan Yang Diperdagangkan dan diantar pualukan.

Peraturan mengenai retribusi biaya pemeriksaan dan penyuntikan tersebut diatur dalam perda nomor 5 tahun 1994. Adapun besarnya retribusi baiaya pemeriksaan dan penyuntikan hewan yang diperdagangkan keluar daerah dan diantar pulaukan adalah ; a. Sapi Rp. 10.000,- per ekor ; b. Kerbau Rp. 10.000,- per ekor ;

- c. Kambing Rp. 2.500,- per ekor.

Apabila ada pelanggaran atas perda diatas maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

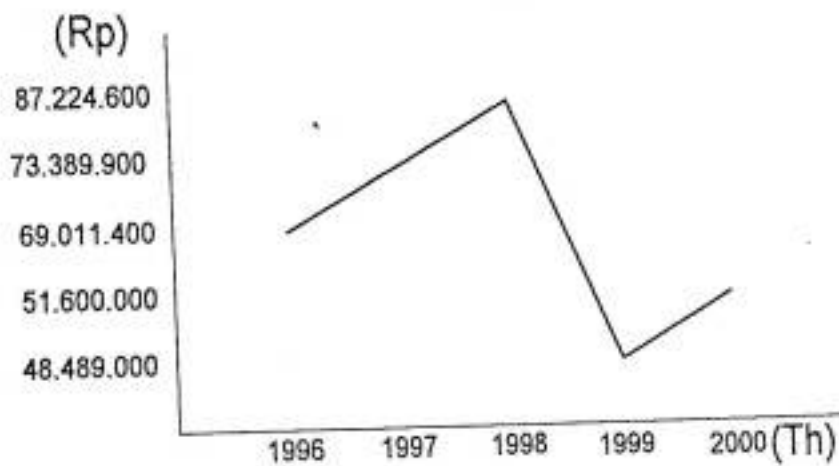
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Dari Sub Sektor Peternakan

Berdasarkan hasil penelitian dari Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Peternakan Kabupaten Mamuju memperlihatkan dengan jelas bahwa pajak dan retribusi dari sub sektor peternakan mengalami penurunan yang sangat besar selama 2 (dua) tahun terakhir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.

Tabel 8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sub Sektor peternakan Di Kabupaten Mamuju, 2000

| No | PAD Dari Sub Sektor Peternakan | Tahun | | | | |
|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1. | Pemeriksaan | 25.420.000 | 25.890.000 | 35.956.000 | 37.629.000 | 38.850.000 |
| 2. | Retribusi Ternak | 28.249.400 | 28.954.400 | 29.380.600 | - | - |
| 3. | Retribusi RPH | 6.830.000 | 9.325.500 | 10.725.000 | 10.860.000 | 12.750.000 |
| 4. | Pajak Potong Hewan | 7.969.000 | 8.462.000 | 10.287.000 | - | - |
| 5. | Retribusi Penjualan Daging | 543.000 | 758.000 | 876.000 | - | - |
| Total | | 69.011.400 | 73.389.900 | 87.224.600 | 48.489.000 | 51.600.000 |

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, 2000



Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sub Sektor Peternakan Kabupaten Mamuju (1996-200)

Dari gambar 1 diatas memperlihatkan adanya penurunan yang sangat besar karena disebabkan oleh di berlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mengatur jenis pajak propinsi dan jenis pajak kabupaten/kota yaitu :

- Untuk pajak daerah/kota terdiri dari
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan "C"
 - g. Pajak Parkir.

Sehingga penerimaan pajak dan retribusi sangat menurun karena adanya pajak dan retribusi yang dihapus, khususnya pajak potong hewan yang dihapus begitu pula dengan retribusi ternak dan retribusi penjualan daging.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

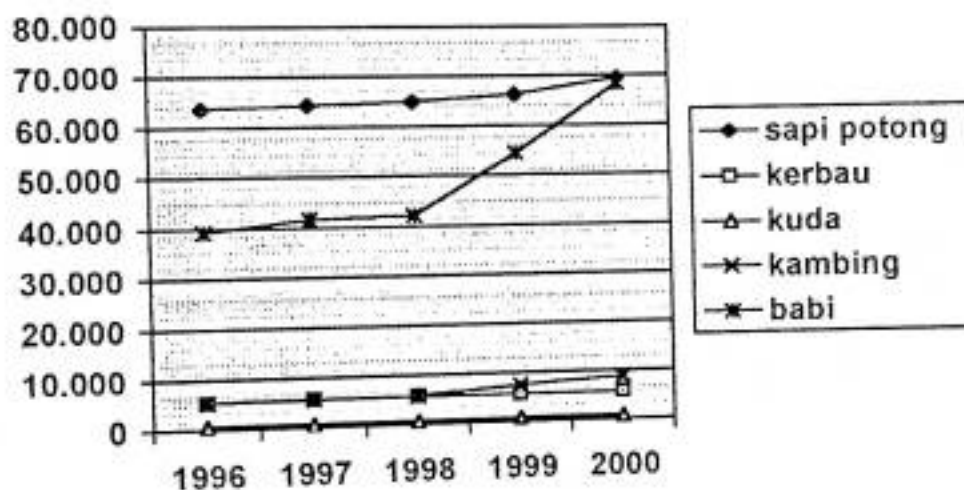
Sumber penerimaan daerah dapat berasal dari berbagai macam, namun secara garis besarnya dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian yaitu , pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan subsidi dari pusat.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Mamuju, dijalankan dengan mengarahkan dan menggali potensi-potensi yang ada dalam upaya penyediaan dana bagi pembangunan daerah. Hal ini sangat penting dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka pemerintah Kabupaten mamuju dengan giatnya dan sungguh-sungguh mencari, dan mernggali potensi sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah bersumber dari sub sektor peternakan yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun diantaranya :

a. Potensi Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten mamuju selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2: Populasi Ternak Di kabupaten Mamuju (1996-2000).

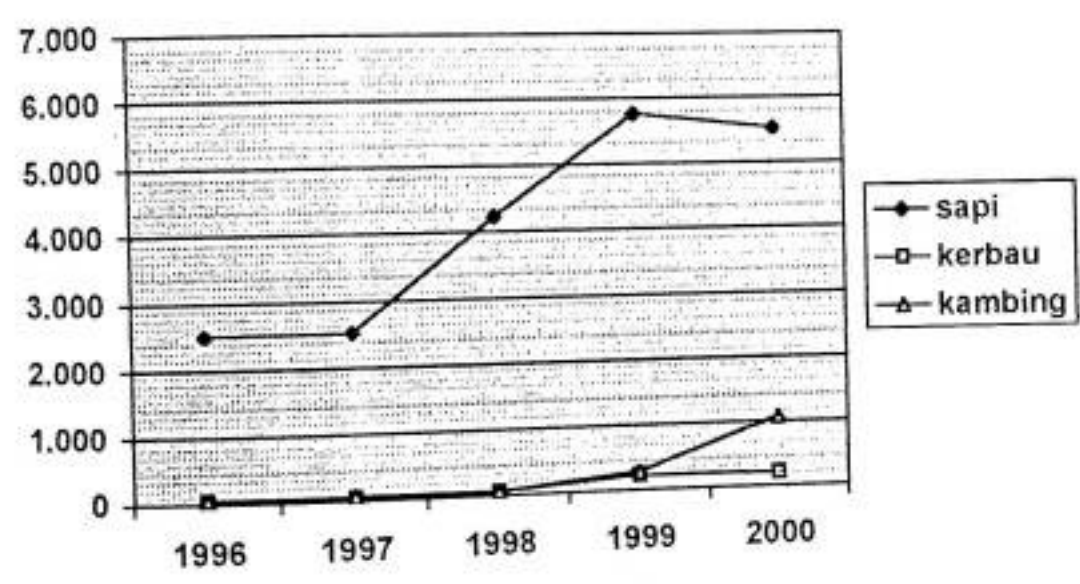
Dalam gambar 2. terlihat bahwa populasi ternak di Kabupaten Mamuju memperlihatkan adanya peningkatan yang setiap tahunnya. Terutama untuk jenis ternak sapi, kambing, ayam buras dapat dilihat pada (lampiran 1).

Kecenderungan untuk meningkatnya populasi ternak diatas karena disebabkan oleh diberlakukannya program Grateks-2 yang mengandalkan komoditas unggulan sub sektor peternakan baik untuk tujuan ekspor maupun subtitusi impor. Adapun komoditas unggulan sub sektor peternakan Kabupaten Mamuju yang masuk dalam Grateks -2 adalah sapi potong, kambing dan ayam buras yang ketiganya merupakan penghasilan daging yang potensial.



b. Banyaknya Pengeluaran Ternak di Kabupaten Mamuju.

Dalam hal kegiatan pengeluaran ternak di kabupaten Mamuju yang merupakan salah satu bagian peningkatan pendapatan asli daerah dari sub sektor peternakan, hal ini dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3 : Banyaknya Pemotongan Ternak Di Kabupaten Mamuju (1996- 2000)

Dari gambar 3 memperlihatkan adanya peningkatan pengeluaran ternak yang diantar-pulaukan, untuk komoditas ternak sapi dan kambing yang mengalami peningkatan yang sangat pesat diakibatkan karena banyaknya permintaan dari pulau Kalimantan dan komoditas ini merupakan salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Mamuju. Sedangkan komoditas ternak kerbau tidak jauh beda peningkatannya dari kedua komoditas diatas namun jumlahnya sangat sedikit.

c. Target dan Realisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan.

Pemungutan pajak dan retribusi merupakan salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju. Untuk pelaksanaan pemungutan pajak tidaklah semudah yang kita harapkan sebab apa yang direncanakan sebelumnya biasanya meleset dari kenyataan walaupun dilaksanakan secara intensif.

Adapun target dan realisasi pemungutan pajak dan retribusi dari sub sektor peternakan yaitu dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Target dan Realisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Mamuju, 2000.

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|------------------|-------|-------------|----------------|----------------|
| 1 | 1996 | 90.890.000 | 69.011.400 | 75,93 |
| 2 | 1997 | 98.650.000 | 73.389.900 | 74,4 |
| 3 | 1998 | 99.500.000 | 87.224.600 | 87,7 |
| 4 | 1999 | 56.320.000 | 48.489.000 | 86,1 |
| 5 | 2000 | 60.435.000 | 51.600.000 | 85,4 |
| Jumlah Rata-rata | | | | 81,9 |

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, 2000

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa realisasi dari pemungutan pajak dan retribusi sub sektor peternakan selama lima tahun hanya mencapai rata-rata 81,9%

Potensi Sumber Daya Alam

Potensi wilayah Kabupaten Mamuju memberikan peluang terhadap pembangunan sub sektor peternakan ketersediaan lahan yang cukup untuk

pengembangan ternak seluas 30.468 Ha atau 2,7% dari luas wilayah Kabupaten Mamuju.

Selain peluang tersebut diatas juga sangat didukung oleh permintaan pasar yang sangat potensial dari Kalimantan ,karena sudah terbukanya transportasi laut yang menghubungkan Kalimantan dengan Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu dengan terbukanya peluang tersebut maka perlu persiapan untuk peningkatan populasi ternak sapi dan kambing, dalam hal ini harus membuka suatu usaha pembibitan dan penggemukan sapi dan kambing. Karena didukung oleh wilayah yang luas dan merupakan salah satu alternatif membuka peluang kerja pada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sub sektor peternakan.

Oleh karena itu usaha peningkatan produksi peternakan dalam pemanfaatan sumber daya alam maka perlu mengupayakan ; a. Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan teknis maupunpelatihan struktural dalam memaju kinerjanya ; b.Mengupayakan penempatan petugas teknis untuk tetap berada di pedesaan dalam melaksanakan tugas peyanan peternakan sehingga dapat mendekati pelayanan yang tepat waktu dan ; c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju

Adapun besarnya kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilihat pada table 10.

Tabel 10. Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju

| No. | Tahun | Pajak Dan Retribusi Sub Sektor Peternakan (Rp) | Kontribusi (%) | Pajak Dan Retribusi Sub Sektor lain (Rp) | Rata-rata Kontribusi (%) |
|------------------|-------|--|----------------|--|--------------------------|
| 1. | 1996 | 69.011.400 | 4,68 | 1.123.553.412 | 3,31 |
| 2. | 1997 | 73.389.900 | 5,15 | 1.157.118.853 | 3,69 |
| 3. | 1998 | 87.224.600 | 4,98 | 1.038.324.526 | 3,7 |
| 4. | 1999 | 48.489.000 | 2,15 | 1.307.754.368 | 3,0 |
| 5. | 2000 | 51.600.000 | 2,1 | 1.173.192.286 | 2,46 |
| Jumlah Rata-rata | | | 3,81 | | 3,2 |

Sumber : Data Yang Telah Di olah, 2000.

Dari tabel 10. terlihat bahwa rata-rata kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan besar selama lima tahun, jika dibandingkan dengan rata-rata pajak dan retribusi sub sektor lain (lampiran 5). Sehingga pemasukann dari sub sektor peternakan cukup besar untuk dapat membiayai pembangunan didaerah Kabupaten Mamuju.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahsana di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Rata-rata Kontribusi Pajak dan retribusi sub sektor peternakan selama lima tahun cukup besar dibandingkan dengan rata-rata dari pendapatan daerah dari sub sektor lain, adapun besarnya rata-rata dari pendapatan asli daerah (PAD) dari sub sektor peternakan selama lima tahun yaitu sebesar 3,81. Sedangkan jumlah rata-rata dari sub sektor lain sebesar 3,2%

SARAN

Sehubungan dengan di berlakukannya UU Nomor 18 tahun 1997 yang disempurnakan dalam UU Nomor 34 tahun 2000 yang mengatur pajak propinsi dan pajak daerah/kota, maka pemerintah Kabupaten Mamuju harus mencari alternatif lain untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1993. Hijauan Makanan Ternak. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah. Biro Bina Otonomi Daerah Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi selatan, Makassar.
- _____, 1991. Perda Nomor 10 Tentang Retribusi Kartu Ternak dan Perubahan Pemilikan Ternak Di Kabupaten Mamuju, Mamuju.
- _____, 1992. Perda Nomor 15 Tentang Pajak Potong Hewan Dalam Kabupaten Mamuju, Mamuju.
- _____, 1993. Perda Nomor 16 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Dalam Kabupaten Mamuju, Mamuju.
- _____, 1994. Retribusi Pemeriksaan dan Penyuntikan Hewan yang Diperdagangkan Keluar Daerah dan Diantar Pulaukan di Kabupaten Mamuju.
- _____, 1997. Kontribusi Pajak dan Retribusi Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tator, makassar.
- Asri,M, 1991. Marketing Unit. Penerbitan dan Percetakan AMP-YKPN, Yogyakarta.
- Azis,M.A., 1993. Agroindustri Sapi Potong Proyek Pengembangan Pada PJPT II. Bangkit, Jakarta.
- Devas, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1993. Dasar-Dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara. Bina Aksara, Jakarta.
- Kamaruddin, 1988. Pengantar Perencanaan Dan Kebijakanaksanaan Ekonomi. Penerbit Alumni, Bandung.
- Kustiah, 1988. Kemungkinan Pengembangan Peternakan Sapi Rakyat Di Sulawesi Selatan. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Mardiasmo, 1997. 1997. Perpajakan .Andi Offset, Yogyakarta.

- Prawirikusumo, 1990. Ilmu Usaha Tani, Edisi I BPFE. Anggota IKAPI UGM, Yogyakarta.
- Rasyaf, 1996. Memasarkan Hasil Peternakan. Penerbit Swadaya, Jakarta.
- _____, 1997. Manajemen Peternakan Ayam Broiler. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Soemarso, Dkk, 1994. Kemandirian Pembiayaan Pembangunan, Seri Kajian Fiskal Dan Moneter. PT.Bina Reka Pariwisata, Jakarta.
- Soemitro R. Rahmat, 1990. Pokok-Pokok Perpajakan. Liberty, Yogyakarta.
- Waluyo, 1997. Ketentuan Undang-Undang Baru Dibidang Perpajakan. LPFE Universitas Indonesia, Jakarta.

Lampiran 1. Populasi Ternak Di Kabupaten Mamuju (1996-2000)

| No. | Jenis Ternak | Tahun | | | | |
|-------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1996 (Ekor) | 1997 (Ekor) | 1998 (Ekor) | 1999 (Ekor) | 2000 (Ekor) |
| 1 | Sapi Potong | 63.693 | 64.335 | 64.991 | 66.267 | 69.507 |
| 2. | Kerbau | 5.309 | 5.628 | 5.697 | 5.551 | 5.733 |
| 3. | Kuda | 654 | 693 | 693 | 738 | 768 |
| 4. | Kambing | 5.320 | 5.640 | 5.768 | 7.565 | 8.856 |
| 5. | Babi | 39.320 | 41.679 | 42.166 | 54.458 | 68.302 |
| 6. | Ayam Buras | 1.631.781 | 1.631.781 | 1.645.814 | 2.055.519 | 2.504.623 |
| 7. | Itik | 17.694 | 18.756 | 18.756 | 34.921 | 54.435 |
| Total | | 1.763.771 | 1.768.512 | 1.783.885 | 2.224.979 | 2.712.224 |

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Mamuju, 2000

Lampiran 2. Pemotongan ternak Di Kabupaten Mamuju, 2000.

| No | Jenis Ternak | Tahun | | | | |
|----|--------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1. | Sapi Potong | 490 | 505 | 508 | 563 | 815 |
| 2. | Kerbau | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 |
| 3. | Kambing | 135 | 146 | 150 | 312 | 314 |
| 4. | Babi | 215 | 217 | 220 | 252 | 410 |
| 5. | Ayam Buras | 137.948 | 143.512 | 28.550 | 175.200 | 212.893 |
| 6. | Itik | 178 | 213 | 250 | 3.475 | 5.416 |

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Mamuju, 2000

Lampiran 3. Banyaknya Pengeluaran Ternak dan Hasil Ternak yang diantar Pulaukan Di Kabupaten mamuju 1996-2000.

| No | Jenis Ternak | Tahun | | | | |
|----|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1996 (Ekor) | 1997 (Ekor) | 1998 (Ekor) | 1999 (Ekor) | 2000 (Ekor) |
| 1. | Sapi | 2.514 | 2.538 | 4.227 | 5.758 | 5.517 |
| 2. | Kerbau | 48 | 51 | 59 | 222 | 205 |
| 3. | Kambing | 54 | 56 | 60 | 276 | 1.074 |
| 4. | Ayam Potong | 1.530 | 1.720 | 1.977] | 2070 | 1.393 |
| 5. | Telu (Kg) | - | - | - | - | 2.100 |
| 6. | Daging (Kg) | - | - | - | - | 1.500 |

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Mamuju, 2000

Lampiran 4. Pendapatan Asli Daerah Dari Sub. Sektor Kabupaten Mamuju.
(1996-2000).

| No | PAD Dari Sub Sektor Peternakan | Tahun | | | | |
|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1. | Pemeriksaan | 25.420.000 | 25.890.000 | 35.956.000 | 37.629.000 | 38.850.000 |
| 2. | Retribusi Ternak | 28.249.400 | 28.954.400 | 29.380.600 | - | - |
| 3. | Retribusi RPH | 6.830.000 | 9.325.500 | 10.725.000 | 10.860.000 | 12.750.000 |
| 4. | Pajak Potong Hewan | 7.969.000 | 8.462.000 | 10.287.000 | - | - |
| 5. | Retribusi Penjualan Daging | 543.000 | 758.000 | 876.000 | - | - |
| Total | | 69.011.400 | 73.389.900 | 87.224.600 | 48.489.000 | 51.600.000 |

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, 2000

Lampiran 5. Perhitungan Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Lain Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju.

1. Tahun 1996/1997.

a. Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan.

Total PAD Kabupaten Mamuju : Rp. 1.474.200.910

| No | Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan | Penerimaan (Rp) |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Pemeriksaan | 25.420.000 |
| 2. | Retribusi Ternak | 28.249.400 |
| 3. | Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) | 6.830.000 |
| 4. | Pajak Potong Hewan | 7.969.000 |
| 5. | Retribusi Penjualan Daging | 543.000 |
| Total | | 69.011.400 |

Share Pajak an Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}}{\text{Total PAD Kabupaten Mamuju}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.69.011.400}}{\text{Rp. 1.475.200.910}} \times 100\%$$

$$= 4,68\%$$



b. Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain Terhadap Pajak dan Retribusi Daerah.

| No. | Pajak Daerah | Penerimaan (Rp) |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 1. | Pajak Pembangunan | 10.982.491 |
| 2. | Pajak Radio | 7.500 |
| 3. | Pajak Bangsa Asing | 22.000 |
| 4. | Pajak Keramaian Umum | 1.738.650 |
| 5. | Pajak Reklame | 11.286.500 |
| 6. | Pajak Kendaraan Tidak Bermotor | 1.091.000 |
| 7. | Pajak Penerangan Jalan | 55.608.575 |
| 8. | Pajak Pendaftaran Perusahaan | 30.635.500 |
| | Total | 11.372.216 |

| No. | Retribusi Daerah | Penerimaan (Rp) |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Leges | 18.965.000 |
| 2. | Dispensasi | 47.426.000 |
| 3. | Sewa Pangkalan | 389.934.000 |
| 4. | Uang Sewa Tanah/Bagunan | 1.511.200 |
| 5. | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 117.142.265 |
| 6. | Retribusi Terminal | 35.526.000 |
| 7. | Retribusi Rumah Sakit, Bagian Pengobatan. | 77.716.343 |
| 8. | Pasar | 218.505.085 |
| 9. | Parkir kendaraan | 7.138.000 |
| 10. | Retribusi Labuang | 3.228.500 |
| 11. | Izin Tempat Usaha | 25.679.100 |
| 12. | Retribusi Sampah | 5.125.000 |
| 13. | Sewa Kios | 8.614.000 |
| 14. | Sewa Pelataran | 7.154.500 |
| 15. | Sewa Alat Berat | 32.815.000 |
| | Total | 1.012.181.196 |

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Pajak Sub Sektor Lain dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju}} \times 100\%$$

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju

$$= \frac{(\text{Rp.}111.372.216 + \text{Rp.}1.012.181.196) \times 100 \%}{\text{Rp.}1.475.200.910}$$

$$= 76,16 \%$$

Rata-Rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\bar{X} = \frac{\text{Share Pajak Dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\sum \text{Pajak Dan } \sum \text{Retribusi Sub Sektor Lain}}$$

$$\bar{X} = \frac{76,16\%}{(8+15)}$$

$$= 3,31 \%$$

2. Tahun 1997/1998.

a. Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan.

Total PAD Kabupaten Mamuju : Rp. 1.424.700.264

| No | Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan | Penerimaan (Rp) |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Pemeriksaan | 25.890.000 |
| 2. | Retribusi Ternak | 28.954.400 |
| 3. | Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) | 9.329.500 |
| 4. | Pajak Potong Hewan | 7.969.000 |
| 5. | Retribusi Penjualan Daging | 758.000 |
| Total | | 73.389.900 |

Share Pajak an Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}) \times 100\%}{\text{Total PAD Kabupaten Mamuju}}$$

$$= \frac{\text{Rp.73.389.900}}{\text{Rp. 1.424.700.264}} \times 100\%$$

$$= 5,15\%$$

b. Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain Terhadap Pajak dan Retribusi Daerah.

| No. | Pajak Daerah | Penerimaan (Rp) |
|-------|--------------------------------|-----------------|
| 1. | Pajak Pembangunan | 15.724.524 |
| 2. | Pajak Bangsa Asing | 30.000 |
| 3. | Pajak Keramaian Umum | 794.100 |
| 4. | Pajak Reklame | 10.214.500 |
| 5. | Pajak Minuman Keras | 790.000 |
| 6. | Pajak Kendaraan Tidak Bermotor | 1.340.700 |
| 7. | Pajak Penerangan Jalan | 83.601.454 |
| 8. | Pajak Pendaftaran Perusahaan | 26.076.000 |
| Total | | 138.571.278 |

| No. | Retribusi Daerah | Penerimaan (Rp) |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Leges | 11.831.000 |
| 2. | Dispensasi | 54.137.430 |
| 3. | Sewa Pangkalan | 387.261.245 |
| 4. | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 152.106.137 |
| 5. | Retribusi Terminal | 43.538.700 |
| 6. | Retribusi Rumah Sakit, Bagian Pengobatan. | 86.305.532 |
| 7. | Pasar | 219.566.926 |
| 8. | Parkir kendaraan | 9.850.000 |
| 9. | Parkir kendaraan | 5.947.000 |
| 10. | Retribusi Labuang | 12.150.600 |
| 11. | Izin Tempat Usaha | 12.150.600 |
| 12. | Retribusi Sampah | 9.610.000 |
| 13. | Sewa Kios | 12.774.250 |
| 14. | Sewa Pelataran | 6.786.500 |
| 14. | Sewa Alat Berat | 6.502.435 |
| Total | | 1.018.547.575 |

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Pajak Sub Sektor Lain dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.138.571.278} + \text{Rp.1.018.547.575}}{\text{Rp.1.424.700.264}} \times 100\%$$

$$= 81,22$$

Rata-Rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\bar{X} = \frac{\text{Share Pajak Dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\sum \text{Pajak Dan} \sum \text{Retribusi Sub Sektor Lain}}$$

$$\bar{X} = \frac{81,22\%}{(8+14)}$$

$$= 3,36\%$$

3. Tahun 1998/1999

a. Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan.

Total PAD Kabupaten Mamuju : Rp. 1.750.550.740

| No | Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan | Penerimaan (Rp) |
|----|---|-----------------|
| 1. | Pemeriksaan | 35.956.000 |
| 2. | Retribusi Ternak | 29.380.600 |
| 3. | Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) | 10.725.000 |
| 4. | Pajak Potong Hewan | 10.287.000 |
| 5. | Retribusi Penjualan Daging | 876.000 |
| | Total | 87.224.600 |

Share Pajak an Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}}{\text{Total PAD Kabupaten Mamuju}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.87.224.600}}{\text{Rp. 1.750.560.740}} \times 100\%$$

Rp. 1.750.560.740

= 4,98%.

b. Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain Terhadap Pajak dan Retribusi Daerah.

| No. | Pajak Daerah | Penerimaan (Rp) |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Pajak Hotel dan restoran | 7.745.895 |
| 2. | Pajak hiburan | 3.993.600 |
| 3. | Pajak Reklame | 12.509.000 |
| 4. | Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Gol "C" | 513.315.453 |
| 5. | Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan | 12.910.128 |
| 6. | Pajak Penerangan Jalan | 95.997.947 |
| | Total | 646.472.023 |

| No. | Retribusi Daerah | Penerimaan (Rp) |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 97.451.458 |
| 2. | Retribusi Pelayanan Persampahan | 12.882.000 |
| 3. | Retribusio Parkir di Tepi Jalan | 9.823.000 |
| 4. | Retribusi Pasar | 43.285.750 |
| 5. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 61.760.000 |
| 6. | Sewa Pelataran | 9.359.000 |
| 7. | Retribusi Terminal | 28.540.800 |
| 8. | Uang Sewa Tanah/Bangunan | 5.000.000 |
| 9. | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 97.613.000 |
| 10. | Sewa Kios | 21.137.500 |
| | Total | 391.852.503 |

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Pajak Sub Sektor Lain dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju}} \times 100\%$$

$$= \frac{(\text{Rp.}646.472.023 + \text{Rp.}391.852.503) \times 100\%}{\text{Rp.}1.750.550.740}$$

$$= 59,31\%$$

Rata-Rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\bar{X} = \frac{\text{Share Pajak Dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\sum \text{Pajak Dan} \sum \text{Retribusi Sub Sektor Lain}}$$

$$\bar{X} = \frac{59,31\%}{(6+10)}$$

$$= 3,37\%$$

4. Tahun 1999/2000

a. Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan.

Total PAD Kabupaten Mamuju : Rp. 2.256.722.791

| No | Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan | Penerimaan (Rp) |
|----|---|-----------------|
| 1. | Pemeriksaan | 37.629.000 |
| 2. | Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) | 10.860.000 |
| | Total | 48.489.000 |

Share Pajak an Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}) \times 100\%}{\text{Total PAD Kabupaten Mamuju}}$$

$$= \frac{\text{Rp.48.489.000}}{\text{Rp. 2.256.722.791}} \times 100\%$$

Rp. 2.256.722.791

$$= 2,15\%$$

b. Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain Terhadap Pajak dan Retribusi Daerah.

| No. | Pajak Daerah | Penerimaan (Rp) |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Pajak Hotel dan restoran | 13.381.960 |
| 2. | Pajak hiburan | 5.412.050 |
| 3. | Pajak Reklame | 28.740.750 |
| 4. | Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Gol "C" | 121.815.963 |
| 5. | Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan | 567.185.054 |
| 6. | Pajak Penerangan Jalan | 16.112.990 |
| | Total | 762.648.769 |

| No. | Retribusi Daerah | Penerimaan (Rp) |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 103.101.436 |
| 2. | Retribusi Pelayanan Persampahan | 8.876.940 |
| 3. | Retribusio Parkir di Tepi Jalan | 11.125.000 |
| 4. | Retribusi Pasar | 104.096.850 |
| 5. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 35.448.000 |
| 6. | Sewa Pelataran | 9.993.000 |
| 7. | Retribusi Terminal | 50.132.000 |
| 8. | Uang Sewa Tanah/Bangunan | - |
| 9. | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 171.398.375 |
| 10. | Retribusi Penjualan Minuman Keras | 1.920.000 |
| 11. | Izin Gangguan | 40.800.000 |
| 12. | Izin Trayek | 8.274.000 |
| | Total | 545.105.601 |

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan Pajak Sub Sektor Lain dan Retribusi Sub Sektor Lain}) \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju}} \\ &= \frac{(\text{Rp.762.648.767} + 545.105.601) \times 100\%}{\text{Rp. 2.256.722.791}} \\ &= 57,93\% \end{aligned}$$

Rata-Rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\bar{X} = \frac{\text{Share Pajak Dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\sum \text{Pajak Dan} \sum \text{Retribusi Sub Sektor Lain}}$$

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{57,93\%}{(6+12)} \\ &= 3,0\% \end{aligned}$$

5. Tahun 2000

a. Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan.

Total PAD Kabupaten Mamuju : Rp. 2.507.135.715

| No | Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan | Penerimaan (Rp) |
|----|---|-----------------|
| 1. | Pemeriksaan | 38.850.000 |
| 2. | Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) | 12.750.000 |
| | Total | 51.600.000 |

Share Pajak an Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}) \times 100\%}{\text{Total PAD Kabupaten Mamuju}}$$

$$= \frac{\text{Rp.51.600.000}}{\text{Rp. 2.507.135.715}} \times 100\%$$

$$= 2,1\%$$

- b. Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain Terhadap Pajak dan Retribusi Daerah.

| No. | Pajak Daerah | Penerimaan (Rp) |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Pajak Hotel dan restoran | 8.085.400 |
| 2. | Pajak hiburan | 3.110.000 |
| 3. | Pajak Reklame | 44.682.000 |
| 4. | Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Gol "C" | 176.314.795 |
| 5. | Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan | 516.067.221 |
| 6. | Pajak Penerangan Jalan | 8.932.870 |
| | Total | 757.192.286 |

| No. | Retribusi Daerah | Penerimaan (Rp) |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 74.869.612 |
| 2. | Retribusi Pelayanan Persampahan | 14.551.000 |
| 3. | Retribusio Parkir di Tepi Jalan | 7.590.000 |
| 4. | Retribusi Pasar | 77.847.700 |
| 5. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 30.717.500 |
| 6. | Sewa Pelataran | 7.357.500 |
| 7. | Retribusi Terminal | 42.135.000 |
| 8. | Uang Sewa Tanah/Bangunan | - |
| 9. | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 100.377.175 |
| 10. | Retribusi Penjualan Minuman Keras | 1.440.000 |
| 11. | Izin Gangguan | 42.775.000 |
| 12. | Izin Trayek | 10.221.000 |
| | Total | 416.000.000 |

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan Pajak Sub Sektor Lain dan Retribusi Sub Sektor Lain}) \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju}} \\ &= \frac{(\text{Rp. } 757.192.286 + \text{Rp } 416.000.000) \times 100\%}{\text{Rp. } 2.507.135.715} \\ &= 46,79\% \end{aligned}$$

Rata-Rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\bar{X} = \frac{\text{Share Pajak Dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\sum \text{Pajak Dan } \sum \text{Retribusi Sub Sektor Lain}}$$

$$\bar{X} = \frac{46,79\%}{(6+12)}$$

$$= 2,46\%$$